

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DI INDONESIA

Oleh:

Dr. Edy Kurnianto

Laboratorium Ilmu Pemuliaan & Reproduksi Ternak

Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro

[Disajikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Ke-49
Universitas Diponegoro, Semarang, Tanggal 11 Oktober 2006]

PENDAHULUAN

Sub sektor peternakan mempunyai andil yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan dan pemenuhan gizi asal ternak. Sampai saat ini konsumsi pangan hewani baru mencapai sekitar 58% (87 gr/kapita/hr dari target 150 gr/kapita/hr), 33% diantaranya baru terpenuhi dari ternak. Konsumsi pangan asal ternak yang kurang ini bisa disebabkan oleh produksi yang memang masih rendah, ataupun karena daya serap masyarakat yang rendah karena faktor tertentu, misalnya masalah kemiskinan. Disisi lain, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 38 juta, yang bagi mereka mengkonsumsi produk primer ternak (susu, daging, telur) masih merupakan katagori mewah.

Pemenuhan kebutuhan pangan asal ternak diupayakan dari usaha peternakan secara baik dan benar. Dalam usaha peternakan, bibit merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting. Sebaik apapun manajemen, selengkap apapun nutrisi pakan dan ketersediaanya bagi ternak, namun andaikata faktor bibit tidak diperhatikan maka produktivitas tidak akan dicapai secara optimal. Di Indonesia, perbibitan ayam sudah berkembang cukup baik. Beberapa perusahaan besar sudah berkecimpung pada usaha tersebut. Pada jenis unggas lainnya, misalnya itik, sudah ada upaya UPT-Dinas Peternakan dan lembaga penelitian yang menginisiasi kegiatan perbibitan melalui persilangan dan seleksi. Sementara itu, pada ternak ruminansia (khususnya sapi) kegiatan perbibitan baru tahap perintisan. Hal ini dapat dimaklumi, siapapun yang akan terjun pada bidang perbibitan ruminansia harus mempersiapkan diri secara matang, mengingat untuk memperoleh bibit unggul diperlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Berbagai pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, ataupun swasta mempunyai kesempatan untuk andil dalam penanganan permasalahan bibit sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Berdasarkan gambaran dan alasan diatas, pembahasan makalah ini lebih difokuskan pada ternak ruminansia (terutama sapi). Mudah-mudahan

sumbangsih pemikiran ini bermanfaat dalam pengembangan perbibitan ternak ke depan.

ISU-ISU STRATEGIS

Berikut disampaikan beberapa isus strategis dalam pembangunan peternakan secara umum yang berpengaruh terhadap pengembangan sub-sub lain di dalamnya, termasuk pengembangan perbibitan.

1. Kurangnya Keberpihakan Pemerintah

Saat ini pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap bidang peternakan, dengan bukti tidak disentuhnya bidang peternakan pada saat penancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) oleh Presiden di Jatiluhur pada bulan Juni 2005. Kebijakan pemerintah secara ekonomi makro jelas belum berpihak pada bidang peternakan.

Bagi kita sebagai insan peternakan, untuk tetap mengeksiskan dunia peternakan maka kita harus tetap pada keyakinan bahwa bidang peternakan merupakan bidang yang sangat strategis dan prospektif. Jumlah penduduk yang lebih dari 220 juta merupakan pasar potensial untuk produk ternak (daging, telur, susu). Lantas, apa langkah konkrit yang harus kita lakukan?? Paling tidak harus ada pertemuan-pertemuan terfokus untuk menghasilkan kesepakatan tentang upaya merevitalisasi peternakan (sebut saja *re-design* pembangunan peternakan) dan menyuarakannya kepada pemerintah, sehingga ke depan ada perbaikan dari berbagai sisi untuk mengeksiskan kembali peternakan. Pertemuan pada seminar kali inipun menjadi media yang sangat baik untuk menghasilkan rumusan-rumusan tentang pentingnya usaha perbibitan ternak yang layak disampaikan kepada pemerintah/departemen terkait.

Pemahaman revitalisasi peternakan pada intinya adalah merealisasikan rencana-rencana program peternakan yang diprioritaskan, misalnya peraturan pemerintah mana yang masih layak dipertahankan atau penerbitan baru peraturan yang berpihak pada bidang peternakan, usaha peternakan yang bagaimana yang lebih berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, pola pembibitan yang bagaimana yang dapat meningkatkan produktivitas ternak, dsb. Pada akhirnya akan terwujud tujuan yang diharapkan bersama, seperti membangun SDM peternakan yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan peternak, dsb.

2. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Ternak

Kebijakan pemerintah (UU Pajak Pertambahan Nilai/PPN No. 18 Tahun 2000, diikuti aturan pelaksanaan berupa PP No. 12 tahun 2001, disempurnakan menjadi PP No. 43 Tahun 2002 dan disempurnakan lagi menjadi PP No. 46 Tahun 2003) menggolongkan hasil peternakan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) bila penyerahannya bukan perorangan. Ini sangat merugikan karena merupakan beban yang tidak kecil. Beban seperti itu membuat usaha dan industri peternakan menjadi tidak efisien. Akibatnya menjadi hal yang wajar bila hasil peternakan tidak memiliki daya saing yang memadai dalam persaingan global. Lain halnya di negara yang sudah maju pertaniannya, termasuk peternakan, para peternak memperoleh kemudahan dari pemerintah, sebagaimana dicontohkan bahwa di beberapa negara Eropa pemerintah memberi subsidi sebesar US\$2/ekor sapi/hari yang setara dengan biaya pemeliharaan 2-3 ekor sapi di Indonesia. Sehubungan dengan masalah PPN, masyarakat peternakan melalui asosiasi-asosiasi ternak telah berusaha meyakinkan pemerintah bahwa kebijakan pengenaan pajak tersebut tidak tepat. Protein hewani merupakan pangan yang seharusnya bebas PPN sebagaimana bahan pokok lainnya seperti beras, gabah, jagung, kedelai, sagu dan garam beryodium. Sampai saat ini UU tersebut di atas belum dicabut. Keresahan yang dialami oleh pelaku bisnis peternakan secara langsung berpengaruh terhadap iklim berusaha, termasuk di dalamnya adalah usaha perbibitan.

3. Impor vs Ekspor

Pada RUU pengganti UU No.6 tahun 1967 dinyatakan bahwa impor ternak boleh dilakukan jika:

- 1) Ada kekurangan ternak untuk kepentingan konsumsi masyarakat,
- 2) Tidak membahayakan manusia dan lingkungan dalam negeri,
- 3) Dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu genetik dan produksi.

Apa yang dapat kita cermati terhadap masalah impor tersebut?

1. Jika dibandingkan antara tahun 2001 dengan 2005, terjadi penurunan populasi sapi sebesar 4,10% (11.137.000 ekor *versus* 10.680.000 ekor, lihat Tabel 1). Sementara itu proporsi pemotongan sapi sebesar 14 -16%/tahun (Tabel 2), yang artinya bahwa jumlah sapi yang dipotong per tahun sebanyak 1,5 – 1,8 juta. Pemotongan sejumlah itu ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang membolehkan impor sapi bisa diterima karena bertujuan untuk menghindari pengurangan populasi, yaitu impor sapi bakalan dan sapi bibit masing-masing untuk tujuan pemotongan dan untuk memperbaiki mutu genetik. Kebijakan ini memberikan dampak

yang baik agar populasi sapi lokal tidak terganggu kuantitasnya. Selain itu kualitas ternak dapat ditingkatkan melalui program persilangan antara sebagian betina lokal dengan bibit dari luar negeri. Dalam hal ini ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu harus ada program yang mempertahankan kemurnian ternak lokal dan menjaga keberadaannya (upaya konservasi), yang ini merupakan suatu keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar.

Impor sapi bakalan cenderung meningkat dari tahun 2002 sampai 2004 sebesar 12,9% - 48,1%, sementara itu impor sapi bibit mengalami penurunan sebesar 10,8% - 27,8%. (Tabel 3).

Tabel 1. Populasi Ternak 2001-2005 (dalam 000 ekor)

		Tahun				
		2001	2002	2003	2004	2005*
1.	Sapi Potong	11.137	11.298	10.504	10.533	10.680
2.	Sapi Perah	347	358	374	364	374
3.	Kerbau	2.333	2.403	2.459	2.403	2.428
4.	Kambing	12.464	12.549	12.722	12.781	13.182
5.	Domba	7.401	7.641	7.811	8.075	8.307
6.	Babi	5.369	5.927	6.151	5.980	6.267
7.	Ayam Buras	268.039	275.292	277.357	276.989	286.690
8.	Ayam Ras Petelur	70.254	78.039	79.206	93.416	98.491
9.	Ayam Ras Pedaging	621.870	865.075	847.744	778.970	864.246
10.	Itik	32.068	46.001	33.863	32.573	34.275

Sumber: Ditjen Peternakan (2005)

* : Angka sementara

Tabel 2. Proporsi Jumlah Pematangan/Populasi (dalam%)

		Tahun				
			2001	2002	2003	2004
1.	Sapi Potong	16,02	14,98	16,52	16,38	14,08
2.	Kerbau	9,29	8,97	7,78	7,59	7,29
3.	Kambing	26,50	25,54	24,94	22,53	21,55
4.	Domba	42,19	25,96	26,03	21,44	14,59

Sumber: Ditjen Peternakan (2005)

* : Angka sementara

Tabel 3. Perkembangan Impor Sapi Bakalan dan Sapi Bibit (dalam ekor)

		Tahun		
		2002	2003	2004
1.	Sapi Bakalan	141.000	208.800	235.800
2.	Sapi Bibit	6.500	5.800	4.200

Sumber: Ditjen Peternakan (2005)

2. Selain dampak positif sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata impor ternak dapat menimbulkan dampak negatif bila pemerintah tidak hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan (baru). Sebagai contoh, selama ini ada larangan import ternak dan produk ternak dari negara-negara yang benar-benar belum bebas penyakit ternak sesuai SK Mentan No. 745/1992. Namun, informasi terkini menyatakan bahwa SK tersebut akan direvisi menjadi Peraturan Mentan. Tampaknya ada perubahan yang nyata bahwa pemerintah akan mengizinkan impor ternak dari negara lain (Argentina, India) yang belum bebas penyakit tertentu (misal PMK). Bila itu terjadi, jelas akan membahayakan kondisi peternakan dalam negeri. Segenap komponen peternakan (perguruan tinggi, dinas, pengusaha, peternak) sudah semestinya merapatkan barisan untuk bersama-sama menyampaikan pendapat dan alasan kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat dan veteriner.
3. Secara ilmiah sudah ada kajian pada sapi perah yang menunjukkan hasil bahwa terdapat interaksi antara genotip dengan lingkungan. Artinya, ternak yang menunjukkan produksi tinggi di negara asal (terutama negara 4 musim) belum tentu menunjukkan produksi yang tinggi juga di Indonesia. Jika melihat fenomena seperti ini, maka lebih baik dilakukan seleksi terhadap ternak-ternak yang memang telah beradaptasi dengan lingkungan Indonesia. Impor ternak unggul (terutama jantan) dapat ditindaklanjuti bila sudah ada rekomendasi dari hasil kajian awal yang mengindikasikan tidak adanya interaksi dari keturunan-keturunan pejantan yang dimaksud.

Terkait dengan ekspor, pada RUU tersebut dinyatakan ekspor boleh dilakukan bila:

- 1) Kebutuhan ternak dalam negeri telah terpenuhi,
- 2) Kelestarian ternak dapat tetap terjamin.

Kenyataannya, apakah kebutuhan ternak dalam negeri sudah tercukupi? Apakah kelestarian ternak dapat terjamin? Dari data statistik menunjukkan

bahwa jumlah ternak masih jauh dari mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Bisa dimengerti, secara linier produk ternak juga masih kurang. Saat ini pemenuhan pangan hewani dari daging sebesar 38,19%, telur 25,30% dan susu 36,52%. Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 konsumsi protein hewani asal ternak secara nasional baru mencapai 5,46 gram/kapita/hr yang setara dengan daging 7,11 kg/kapita/th, telur 4,71 kg/kapita/th dan susu 6,80 kg/kapita/th. Disisi lain konsumsi karbohidrat masih tinggi, yaitu beras 121 kg/kapita/th, kacang-kacangan 8,3 kg/kapita/tahun dan umbi-umbian 17,8 kg/kapita/tahun.

Melihat kenyataan seperti itu, sudah waktunya pemerintah merencanakan secara matang untuk jangka panjang dan berkelanjutan tentang upaya peningkatan produktivitas ternak, salah satunya melalui perbibitan ternak. Ajakan pemerintah terhadap investor untuk berusaha dibidang perbibitan peternakan merupakan tindakan yang arif.

Tabel 4. Konsumsi Daging, Telur dan Susu dan Konsumsi Protein Hewani Tahun 2001-2005

		Konsumsi/Kapita/Tahun (kg)			Konsumsi Protein/ Kapita/Hari (gram)			
		Daging	Telur	Susu	Daging	Telur	Susu	Jumlah
1.	2001	5,28	3,42	5,79	2,49	1,08	0,51	4,08
2.	2002	5,75	4,04	7,05	2,71	1,28	0,62	4,61
3.	2003	5,96	4,11	6,69	2,81	1,30	0,59	4,70
4.	2004	6,17	4,38	6,78	2,91	1,39	0,60	4,80
5.	2005	7,11	4,71	6,80	3,37	1,49	0,60	5,46

Sumber: Ditjen Peternakan (2005)

Pengeksportan ternak boleh dilakukan sepanjang ada penjagaan kemurnian dan keberadaan plasma nutfah, serta bila populasi sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lebih penting lagi adalah ada perhitungan yang jelas berapa jumlah ternak yang harus dikeluarkan, ternak-ternak mana yang boleh dikeluarkan, dan sebagainya. Keadaan menjadi runyam bilamana tidak ada pengawasan yang ketat terhadap masalah ini. Jadi jelas bahwa tanggung jawab bersama atas keberadaan plasma nutfah Indonesia merupakan hal yang mutlak.

LANDASAN PERATURAN TERKAIT PERBIBITAN

1. Komisi Bibit Nasional

Kajian-kajian tentang jenis komoditas ternak unggul menjadi hal yang sangat penting, agar dimasa mendatang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan bibit ternak. Demi mencapai harapan yang diinginkan tersebut maka perlu adanya operasionalisasi oleh suatu komisi bibit nasional. Atas dasar pertimbangan itulah Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan No. 315/Kpts/KP.150/2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional (KBTN) yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam penetapan kebijakan sistem perbibitan ternak nasional, pengujian, penilaian dan pelepasan strain dan atau breed baru, sertifikasi bibit ternak, dan pengawasan mutu bibit ternak, melalui Direktur Jenderal Produksi Ternak. Selama ini, dalam menjalankan tugasnya, KBTN melibatkan perguruan tinggi peternakan.

2. Pedoman Perbibitan Ternak Nasional

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur daerahnya, termasuk bidang pertanian-peternakan. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengembangan ternak bersifat desentralisasi. Ketersediaan bibit nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam mengembangkan ternak di wilayahnya. Agar dapat terjamin ketersediaan bibit ternak yang memenuhi syarat maka diperlukan arahan bagi perumusan kebijakan dan pelaksanaan aspek perbibitan. Terkait dengan hal tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 208/Kpts/OT.210/4/2001 tanggal 4 April 2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional dengan tujuan:

1. Menyediaan bibit ternak yang memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan sosial,
2. Mengembangkan sistem dan perusahaan perbibitan ternak sebagai komponen agribisnis peternakan secara keseluruhan,
3. Memanfaatkan sumberdaya genetik ternak secara lestari, dan
4. Mengembangkan daerah/ kawasan sebagai sumber bibit ternak.

Klasifikasi bibit menurut SK Menteri Pertanian di atas adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum klasifikasi bibit terdirin atas: bibit dasar (*Foundation Stock*), bibit induk (*Breeding Stock*) dan bibit niaga (*Commercial Stock*).
- b. Secara khusus untuk beberapa spesies tertentu seperti unggas dan babi, klasifikasi bibit terdiri atas:

- b.1. Bibit galur murni (*Pure Line-PL*) merupakan bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan nenek (*Grand Parent Stock – GPS*).
- b.2. GPS merupakan bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (*Parent Stock – PS*).
- b.3. PS merupakan bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit niaga (*Final Stock – FS*).
- b.4. FS adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara menghasilkan telur/ daging.

3. Pengembangan Kawasan Sumber Bibit

Kawasan sumber bibit adalah suatu wilayah yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan bibit ternak dari spesies atau bangsa tertentu, baik murni atau persilangan, yang terkonsentrasi sesuai *agro-ecosystem*, pasar serta dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.

Dalam mengembangkan kawasan sumber bibit, maka perlu diperhatikan aspek-aspek:

- a. Genetik, yaitu pertimbangan genetis dalam penggunaan bibit ternak murni dan atau hasil persilangan untuk mempertahankan spesifikasi masing-masing bibit tersebut, antara lain dengan pemisahan kawasan.
- b. Potensi, yaitu kesesuaian *agro-ecosystem* dan kapasitas daya dukung kawasan dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumberdaya.

Pengembangan kawasan menjadi dasar untuk pengembangan ternak dan penyebarannya. Segala sesuatu yang terkait dengan usaha penyebaran dan pengembangan ternak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan No. 417/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

Menurut Direktur Jenderal Peternakan, untuk program aksi bibit secara nasional pemerintah mengalokasikan Rp 55,36 milyar dari APBN 2006, 60% diantaranya untuk perbibitan sapi. Masing-masing propinsi diberi kesempatan mengembangkan perbibitan ternak melalui Village Breeding Center (VBC).

Sebenarnya disamping pemerintah daerah, pihak swasta yang mampu dan ingin berinvestasi di bidang perbibitan harus difasilitasi pemerintah. Kita perlu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengusaha/ swasta yang bergerak dibidang perbibitan. Sekarang ini sudah ada beberapa pihak swasta yang merintis usaha perbibitan, antara lain: Lembu Jantan Perkasa

(LJP, Serang), Great Giant Livestock Coy (GGLC, Lampung), Santori (Jatim) dan Lembu Betina Subur (LBS, Sumbar).

4. Budidaya Ternak yang Baik

Upaya memperoleh bibit melalui perencanaan yang baik harus diikuti oleh tatacara pengelolaan ternak secara baik. Pada ternak besar terdapat peraturan yang menekankan budidaya ke arah *Good Farming Practice*, untuk sapi potong mengacu pada SK Mentan No. 419/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 dan untuk sapi perah mengacu SK Menteri Pertanian No. 422/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001

PERAN PERGURUAN TINGGI PETERNAKAN

Masing-masing komponen pelaku peternakan mempunyai kesempatan dalam membangun dunia peternakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Fakultas Peternakan yang menjadi bagian insituti besar perguruan tinggi merupakan lembaga akademik dan lembaga ilmiah berperan dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara spesifik terkait dengan permasalahan perbibitan, berikut disampaikan beberapa pokok pemikiran tentang peran perguruan tinggi:

1. Muatan Kurikulum

Dilihat dari sisi akademik, Fakultas Peternakan berperan dalam memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan (*transfer of knowledge*) kepada mahasiswa. Bekal ilmu tersebut dikemas dalam bentuk kurikulum yang terstruktur dan pengetahuan tentang perbibitan ternak dituangkan ke mata kuliah (MK) Pemuliaan Ternak. Di Fakultas Peternakan Undip, mahasiswa yang secara lengkap memperoleh ilmu tentang pemuliaan-perbibitan secara lebih luas adalah mahasiswa di Program Studi Produksi Ternak, yang meliputi: MK Dasar Pemuliaan Ternak, MK Ilmu Pemuliaan Ternak dan MK Manajemen Pembibitan Ternak. Materi yang diberikan dari ketiga MK tersebut dirasakan cukup bagi mahasiswa untuk memahahi perihal perbibitan. Namun, tiga program studi lain (PS Teknologi Hasil Ternak, PS Sosial Ekonomi Peternakan dan PS Nutrisi & Makanan Ternak) hanya memperoleh MK Dasar pemuliaan Ternak. Perbedaan muatan kurikulum untuk MK terkait pemuliaan disadari memang berhubungan dengan tuntutan spesifikasi program studi.

2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Peran Fakultas Peternakan dari dharma ke-2 dan ke-3 adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf pengajar dapat diketahui dan dimanfaatkan masyarakat, serta metode-metode ataupun prosedur kerja dapat diimplementasikan di lapangan. Disisi lain hasil penelitian pun dapat dimanfaatkan oleh dinas terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tentang pelestarian dan peningkatan produktivitas ternak (lokal). Penelitian tentang pemuliaan ternak/perbibitan tidak lepas dari sistem perkawinan dan seleksi. Penelitian tentang kedua topik besar tersebut sudah sering dilakukan, dan hasilnya telah dilaporkan baik melalui laporan formal maupun dipublikasi di jurnal ilmiah. Memang disadari, kuantitas penelitian perbibitan ternak lokal masih kurang, sehingga masih terbuka luas peluang penelitian di bidang perbibitan. Terkait dengan pelaksanaan penelitian, maka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang perbibitan ternak sangat penting agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Topik-topik khusus penelitian ke depan yang menarik untuk dilaksanakan adalah:

- a. Penelitian dasar ciri fenotipik dan genotipik ternak lokal/*indigenous breed* Indonesia (sapi Jawa, kambing Kacang, ayam Kedu, dsb.)
- b. Penelitian pemurnian dan konservasi untuk mempertahankan keberadaan ternak lokal Indonesia.
- c. Kajian menuju sertifikasi bangsa murni ternak lokal
- d. *Crossing* antara ternak lokal dengan *exotic breed* untuk meningkatkan produktivitas keturunan dan **hanya** untuk tujuan niaga.
- e. Pembentukan kawasan baru untuk perbibitan ternak lokal tertentu yang sesuai dengan *agro-ecosystem* dan *agro-climate* wilayah tertentu.
- f. Analisis daya dukung wilayah perbibitan.

Secara umum penelitian atau kajian yang dilakukan harus:

- a. Mampu memberikan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan atau revisi kebijakan untuk usaha perbibitan dan peningkatan produktivitas ternak pada tataran lokal, regional maupun nasional.
- b. Menghasilkan pengembangan model pengembangan agribisnis peternakan dan agroindustri peternakan/perbibitan.

3. Komunikasi dan *Networking*

Perguruan tinggi/ Fakultas Peternakan menyadari bahwa komunikasi yang terjalin dengan dinas teknis dan pihak swasta dirasakan sangat penting. Seminar, sarasehan, lokakarya, rapat koordinasi, dsb sering dilakukan dengan melibatkan unsur perguruan tinggi. Pertemuan dalam bentuk silaturahmi informal maupun pertemuan ilmiah formal sangat bermanfaat mengingat:

- a. Menjadi ajang penyampaian informasi tentang temuan-temuan baru hasil penelitian atau kajian bidang peternakan, termasuk di dalamnya perbibitan.
- b. Bersama-sama dengan swasta dan dinas terkait menyampaikan respon/input/asupan kepada pemerintah pusat atas kebijakan yang kurang berpihak pada peternak, dengan harapan ada revisi menuju kepada tujuan yang diharapkan oleh insan peternakan secara luas.
- c. Bersama-sama dengan dinas terkait membahas atau secara terpisah memberikan asupan tentang rencana penyusunan strategi perbibitan untuk komoditas tertentu di wilayahnya.
- d. Secara institusi berpartisipasi di percaturan nasional (misal: anggota Komisi Bibit Ternak Nasional, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia).

Kegiatan seminar kali ini pun sebenarnya dikategorikan ke dalam kegiatan komunikasi/koordinasi yang membahas perbibitan ternak ke depan. Komunikasi dapat terjalin dengan baik bila sudah ada komitmen nyata untuk membangun *networking*.

4. Orientasi Pendidikan Peternakan

Pendidikan peternakan mulai sekarang harus berorientasikan *enterpreunership*. Hal ini penting mengingat orientasi pembangunan peternakan ke depan adalah membangun sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan. Pada usaha perbibitan, secara bisnis harus ada upaya penggantian terus menerus ternak unggul melalui *projective planning*, artinya ada perencanaan berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan perkembangan terus menerus. Terkait dengan upaya mempertahankan ternak yang bermutu tinggi, harus ada kesadaran dan upaya nyata bahwa hanya ternak yang kurang layak sebagai bibit yang dipelihara untuk dipotong (sesuai dengan *Good Farming Practice*). Agribisnis perbibitan ke depan harus bersifat: a) *berdaya saing*, artinya harus mampu menerobos pasar, b) *lokalitas*, artinya mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat untuk mengembangkan perbibitan berdasarkan keunggulan komparatif, sesuai dengan *agro-ecosystem* dan *agro-climate*, dan 3) *berkerakyatan*, artinya untuk mensejahterakan rakyat.

KESIMPULAN

- 1 Program pengembangan perbibitan ternak sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan populasi, sekaligus

- peningkatan produktivitas ternak dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang memihak dunia peternakan dalam negeri.
- 2 Peran perguruan tinggi terhadap pembangunan peternakan dan pengembangan perbibitan ternak cukup banyak dan nyata, antara lain melalui paradigma pendidikan peternakan, orientasi penelitian, dan komunikasi dan *networking* dengan pihak lain.
 - 4 Penguasaan ipteks mutlak diperlukan dalam pengelolaan sumber daya genetik ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M., W. Hardjosubroto, Sunardi and S. Bintara. 2002. Livestock Breeding and Reproduction in Indonesia: Past and Future. The 3rd Internasional Seminar on Tropical Animal Production, Yogyakarta, October 15-16, 2002.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2005. Statistik Peternakan 2005. Departemen Pertanian.
- Dwiyanto, K. Kuswandi and I. Inounu. 2002. Designing Livestock Production Systems through Enhanced Utilization of Local Resources. The 3rd Internasional Seminar on Tropical Animal Production, Yogyakarta, October 15-16, 2002.
- Husodo, S.Y. 2003. Prospek Bisnis Pertanian dan Industri pada Era Perdagangan Bebas. Workshop dan Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian. Badan Penelitian Pengembangan Propinsi Jawa Tengah, 9 September 2003.
- Menteri Pertanian. 2000. Surat Keputusan No. 315/Kpts/KP.150/6/2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional.
- Menteri Pertanian. 2001. Surat Keputusan No. 208/Kpts/OT.210/4/2001 tanggal 4 April 2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional.
- Menteri Pertanian. 2001. Surat Keputusan No. 417/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- Menteri Pertanian. 2001. Surat Keputusan. No. 419/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong yang Baik (*Good Farming Practice*).

Menteri Pertanian. 2001. Surat Keputusan. No. 422/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah yang Baik (*Good Farming Practice*).